

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini media memiliki peran yang penting dalam kehidupan berdemokrasi. Media dalam hal ini tampil sebagai jembatan informasi terhadap masyarakat. Hal ini telah menjadikan media sebagai salah satu sumber informasi terpercaya yang dapat membentuk pandangan masyarakat, dimana media selalu menyampaikan informasi-informasi aktual yang di konsumsi oleh masyarakat secara luas. Pada era reformasi saat ini, media semakin mendapat angin segar dengan dibukanya pintu kebebasan pers di Indonesia.

Peran dan fungsi media yang semakin kuat ini telah membawa media sebagai pilar keempat dalam demokrasi setelah lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif (*Junaedi, 2007: 14*). Bahkan media saat ini dapat dikatakan menjadi pilar utama dalam berdemokrasi. Hal ini disebabkan oleh pemberitaan media yang dapat mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam tiga lembaga tersebut di atas. Lebih jauh, media saat ini telah mampu mengkonstruksi pandangan masyarakat terhadap wacana yang berkembang melalui pemberitaan yang disajikan.

Konstruksi pemberitaan media, menyebabkan masyarakat sangat percaya pada pemberitaan yang disajikan. Dalam hal ini, pemberitaan utama atau *headline* yang ditampilkan oleh media selalu saja menjadi wacana utama

dalam masyarakat. Pemberitaan tersebut mempengaruhi opini yang terbangun pada masyarakat. Hal ini menyebabkan pandangan masyarakat terkonstruksi oleh pemberitaan media, dimana wacana yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat akan banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media.

Kondisi ini menyebabkan media memiliki kemampuan yang kuat dalam membentuk citra sesuatu pada masyarakat. Melalui berita-berita yang ditampilkan, media dapat membentuk citra lembaga atau seseorang dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena media memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi dan membentuk opini publik yang berpengaruh pada persepsi masyarakat (*Rahabeat, 2004: 19*). Artinya, media dapat membentuk citra sebuah lembaga atau seseorang di ruang publik. Dengan kata lain, media memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi citra sesuatu di ruang publik.

Kemampuan media mengkonstruksi citra melalui berita-berita yang ditampilkan telah menjadikan media memiliki kekuatan dalam membentuk figur seseorang atau citra lembaga pada masyarakat. Implikasinya, opini masyarakat akan terbentuk disesuaikan oleh berita-berita yang diinformasikan oleh media. Melalui pemberitaan media, kesadaran masyarakat akan terkonstruksi menjadi suatu opini yang akan berpengaruh terhadap wacana dalam masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk perspektif masyarakat tentang suatu hal. Dalam hal ini, pemberitaan dari media yang dikategorikan besar dan dominan tentunya akan berimplikasi signifikan pada wacana yang berkembang pada masyarakat dan berefek besar pula dalam

mengkonstruksi pandangan masyarakat mengikuti informasi yang disampaikan oleh media tersebut.

Konstruksi pemberitaan media tentunya tidak bisa dilepaskan dari ideologi media dan ideologi wartawan dari media tersebut. Berita-berita yang ditulis oleh wartawan akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang ia miliki dan perspektif yang ia gunakan dalam merefleksikan suatu peristiwa. Selain hal tersebut, ideologi media akan sangat berpengaruh pada penerbitan media yang dikeluarkan oleh redaksi. Dalam hal ini, ideologi media ini akan dikontrol oleh editor.

Melalui proses editing, ideologi media akan dipertahankan agar ciri khas pemberitaan suatu media tetap dapat bertahan. Ketika menggunakan perspektif kritis, ideologi media akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal. Hal ini terkait erat dengan kepentingan ekonomi politik. Artinya, ketika suatu berita terindikasi mengancam kepentingan pemilik modal, maka berita itu tidak akan dimuat atau walaupun dimuat, maka berita itu akan diperhalus agar kepentingan pemilik modal tidak terganggu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa letak ideologisasi media itu ada pada politik redaksi media.

Kompas adalah media nasional terbesar di Indonesia (*Rahabeat, 2004: 19*). Sebagai media nasional terbesar di Indonesia, pemberitaan yang dimuat pada Kompas akan sangat berpengaruh pada wacana yang berkembang dalam masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pemberitaan Kompas, menyebabkan konstruksi pesan yang disampaikan oleh Kompas berimplikasi

signifikan dalam membentuk opini pada masyarakat. Posisi yang demikian menyebabkan pemberitaan Kompas memiliki pengaruh yang besar dalam mengkonstruksi citra seseorang atau lembaga di dalam masyarakat.

Menarik untuk menganalisis konstruksi pemberitaan tentang Soeharto pasca wafat pada *headline* koran Kompas. Hal ini dikarenakan pemberitaan yang menjadi *headline* koran Kompas yang berkategori sebagai media besar dan dominan, tentunya akan menjadi wacana utama dalam masyarakat. Dimana pemilihan *headline* sebuah berita tentunya melewati proses penseleksian yang dipengaruhi oleh faktor politik redaksi media. Dalam hal ini, pemberitaan tentang wafatnya Soeharto menjadi *headline* utama dan mendapat ruang satu halaman penuh pada halaman pertama koran Kompas edisi 28 dan 29 Januari 2008.

Selain hal tersebut di atas, faktor citra Kompas selama ini sebagai media yang berpihak pada rakyat dan kritis terhadap kebijakan pemerintah menjadikan pemberitaan pada *headline* koran Kompas menarik untuk dianalisis. Dengan slogan “amanat hati nurani rakyat” Kompas dipercaya akan memberitakan sesuatu secara objektif dan berangkat dari perspektif kerakyatan. Artinya, pemberitaan tentang wafatnya Soeharto pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 pada pukul 13.10 WIB (*Kompas*, 2008: 2) perlu untuk dianalisis perspektif pemberitaannya. Soeharto kelahiran di Kemusuk, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Juni 1921, wafat di tengah masa persidangan perkara perdatanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*Kompas*, 2008: 12). Dalam hal ini, menarik untuk menganalisis konstruksi

pesan yang diinformasikan oleh Kompas terhadap sosok Soeharto yang kontroversial.

Kepergian Soeharto meninggalkan reaksi beragam. Bagi para aktivis gerakan demokrasi yang menjadi korban kebijakan represif di era Orde Baru, Soeharto dikenang sebagai tokoh diktator (*Kompas, 2008: 4*). Dimata orang-orang atau sanak keluarga dari orang-orang yang dihukum mati, terbunuh, atau dijebloskan ke dalam penjara selama bertahun-tahun dengan tuduhan termasuk kelompok Soekarnois, atau anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah Soeharto mundur dari jabatannya, kelompok yang dijadikan kambing hitam atas peristiwa pembunuhan ketujuh Pahlawan Revolusi pada tahun 1965 itu bangkit kembali dan mencoba meluruskan sejarah (*Kompas, 2008: 5*).

Dengan istilah pemerintahan Orde Baru dimana Soeharto berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, ia dikenal sebagai presiden yang otoriter. Dalam hal ini, Soeharto berkuasa sejak mendapat surat perintah sebelas Maret yang sering disingkat dengan “Supersemar” pada tahun 1966 sampai pada saat reformasi 21 Mei 1998. Salah satu tindakan represif Soeharto dimasa pemerintahannya adalah peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 yang sering disingkat dengan “Malari”.

Tokoh peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), Hariman Siregar, menilai Soeharto sebagai pemimpin negara yang sangat diktator. “Saya ini orang yang paling dicerca oleh Soeharto. Saya diseret ke penjara, ayah saya meninggal saat saya dipenjara, istri saya sakit, dan anak kembar saya

meninggal.” Hariman mengatakan, Soeharto adalah seorang pemimpin diktator yang percaya bahwa pembangunan dapat dicapai dengan kekerasan dan mengabaikan rakyat (*Kompas, 2008: 4*).

Selain represif terhadap pergerakan yang mengkritisi kebijakan pemerintahan Orde Baru, Soeharto juga bersikap represif terhadap pemberitaan media masa. Dalam hal ini, media yang mendapat izin untuk menjalankan aktivitasnya sepenuhnya berada dalam kontrol pemerintah orde baru. Media yang memberitakan tentang pergerakan yang mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru akan dicabut izin usahanya. Dimana Kompas termasuk salah satu media yang pernah dicabut izin terbitnya.

Peristiwa ini sangatlah riskan dan berbahaya karena sikap otoriter rezim Soeharto pada masa itu. Dimana setiap media yang memberitakan sesuatu yang dapat mengganggu rezim Orde Baru akan diberangus atau dicabut surat izin terbitnya. Hal ini seperti yang terjadi pada beberapa media setelah memberitakan berita tentang demonstrasi mahasiswa tahun 1974 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari). Dimana dalam hal ini mahasiswa menentang pemerintahan rezim Soeharto dengan melakukan aksi besar-besaran. Peristiwa ini mengakibatkan pimpinan mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan dan 12 media yang memberitakan peristiwa ini dicabut izin terbitnya atau di beredel. Media itu diantaranya Indonesia Raya, Pedoman, The Jakarta Times dan abadi (*Rachman dalam Hidayat, 2000: 120*).

Sikap represif pemerintahan Orde Baru, terlihat pada momentum selanjutnya yang ditemukan oleh gerakan yang menentangnya. Sebagaimana momentum 1978 dimana mahasiswa melakukan aksi besar-besaran untuk menolak Soeharto naik kembali menjadi presiden. Pada peristiwa ini, sekitar 14 media memuat berita tentang aksi besar-besaran mahasiswa yang menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden. Karena peristiwa ini akhirnya 14 media yang memuat berita tentang aksi penolakan mahasiswa ini kembali dicabut surat izin penerbitannya. Media itu diantaranya Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi dan Pos Sore. Namun setelah tujuh media mengajukan permohonan maaf kepada pemerintah akhirnya mereka diberikan hak untuk terbit kembali (*Rachman, 2008: 6*). Hal ini mengharuskan Kompas meminta maaf kepada pemerintah agar surat izin terbitnya diberikan kembali oleh pemerintah.

Sosok Soeharto pertama kali digambarkan oleh OG Roeder dalam bukunya *The Smiling General*. Kepribadian Soeharto tersembunyi di balik senyum yang mengembang. Dilukiskan oleh OG Roeder, “*Wajah The Smiling General menjadi keras di bawah beban tanggung jawab yang berat. Roman mukanya mencerminkan kalau ia bisa menjadi komandan yang keras kepala di kala stress. Adalah salah besar menafsirkan senyum Soeharto sebagai tanda kalau ia seorang yang lemah*” (*Kompas, 2008: 11*). OG Roeder adalah koresponden dari *Far Eastern Economic Review* dan majalah *Stern*, Jerman. Ia menetap di Indonesia sejak tahun 1959 bersama istrinya.

Dengan memahami bahwa media termasuk sebagai pilar penegak demokrasi dan berperan sebagai fungsi kontrol terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, media diharapkan menginformasikan pemberitaan yang objektif dan memihak pada kepentingan rakyat. Dalam hal ini, korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa rezim Orde Baru menilai pemberitaan media massa terkait mantan Presiden Soeharto berlebihan. Mereka berpendapat pemberitaan itu tidak proporsional karena tidak memberitakan akibat kebijakan mantan penguasa itu. Untuk itu, korban dan keluarganya berharap media mampu bersikap seimbang dengan memberi perspektif lain tentang mantan presiden itu. Di sisi lain, rangkaian wacana pemaafan yang dibangun sebagian elit justru tampak sebagai tameng penyelamatan diri pada kroni Soeharto (*Kompas, 2008: 3*).

Berdasarkan pemaparan di atas, pada saat rezim Orde Baru telah runtuh dan Indonesia saat ini telah memasuki era reformasi sebagai babak baru dalam perjalanan politiknya, menjadi menarik untuk menganalisis konstruksi pemberitaan tentang Soeharto pasca wafat dalam pemberitaan media saat ini. Hal ini didasarkan pada realitas dimana media memiliki kekuatan yang besar dalam mengkonstruksi citra suatu lembaga atau seseorang melalui pemberitaannya.

Alasan mengapa penulis dalam hal ini mengambil Kompas sebagai objek penelitian dikarenakan Kompas merupakan media nasional terbesar di Indonesia dengan pembaca sekitar 3.000.000 orang (*Rahabeat, 2004: 27*). Selain hal tersebut, pemberitaan di Kompas dikenal objektif sehingga hal ini

menyebabkan masyarakat sangat percaya pada pemberitaan di Kompas. Dalam hal ini, pemberitaan di Kompas dapat mempengaruhi pencitraan terhadap suatu lembaga atau seseorang di masyarakat. Dengan demikian, konstruksi pesan yang diberitakan oleh Kompas menarik untuk dianalisis.

Selain hal tersebut di atas, kasus pemberedelan atau pencabutan izin terbit yang pernah menimpa Kompas pada masa pemerintahan Soeharto, menjadikan pemberitaan pada *headline* Kompas menarik untuk dianalisis. Hal ini dikarenakan adanya tanggapan bahwa media tidak proporsional dalam memberitakan tentang Soeharto pasca wafat. Dimana pemberitaan tentang wafatnya Soeharto seakan-akan mengkonstruksikan pesan yang tidak proporsional sehingga melupakan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang represif dan otoriter.

Dengan citra Kompas sebagai media yang berpihak pada rakyat dan kritis terhadap kebijakan pemerintah, hal ini menjadikan pemberitaan tentang wafatnya Soeharto pada *headline* koran Kompas menarik untuk dianalisis perspektif pemberitaannya. Selain itu, dengan slogan “amanat hati nurani rakyat”, Kompas dipercaya akan memberitakan sesuatu secara objektif dan berangkat dari perspektif kerakyatan.

Untuk itu, perlu dianalisis perspektif pemberitaan Kompas pada pemberitaan tentang wafatnya Soeharto. Dalam hal ini, konstruksi pemberitaan tentang Soeharto pasca wafat pada *headline* koran Kompas edisi 28-29 Januari 2008. Hal ini dikarenakan pada dua edisi tersebut, pemberitaan tentang wafatnya Soeharto menjadi *headline* pada koran Kompas dan

mendapatkan tempat satu halaman penuh pada halaman pertama. Artinya, berita yang menjadi *headline* pemberitaan sebuah media, tentunya merupakan hasil dari proses politik redaksi media. Karena itu, penulis mengambil judul **“Analisis Wacana Konstruksi Pemberitaan Tentang Soeharto Pasca Wafat Pada *Headline* Koran Kompas Edisi 28-29 Januari 2008”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian, masalah perlu dirumuskan terlebih dahulu untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah. Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya (*Surachman, 1990: 34*).

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana konstruksi pemberitaan tentang Soeharto pasca wafat pada *headline* koran Kompas edisi 28-29 Januari 2008?

C. Tujuan penelitian

Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui konstruksi pemberitaan tentang Soeharto pasca wafat pada *headline* koran Kompas edisi 28-29 Januari 2008. Penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana konstruksi pemberitaan tentang Soeharto pasca wafat pada *headline* koran Kompas edisi 28-29 Januari 2008.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang komunikasi massa berkaitan dengan analisis teks media khususnya metode wacana (*Critical Discourse Analysis*) dalam melihat konstruksi pesan sebuah media. Dalam hal ini dapat diketahui tentang bagaimana media dalam mengkonstruksi citra seseorang melalui pemberitaannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada khalayak tentang wacana yang ditampilkan oleh Kompas mengenai pemberitaan tentang Soeharto pasca wafat. Serta penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para peminat seputar masalah analisis teks media khususnya pada kajian analisis wacana kritis. Dimana sebagai suatu kajian kritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu membentuk kesadaran sosial masyarakat tentang bagaimana pers tidak hanya menjalankan fungsi dan perannya dalam memberikan informasi kepada publik, akan tetapi pers juga membawa berbagai nilai, ideologi dan kepentingan institusi medianya ataupun kelompok-kelompok tertentu.

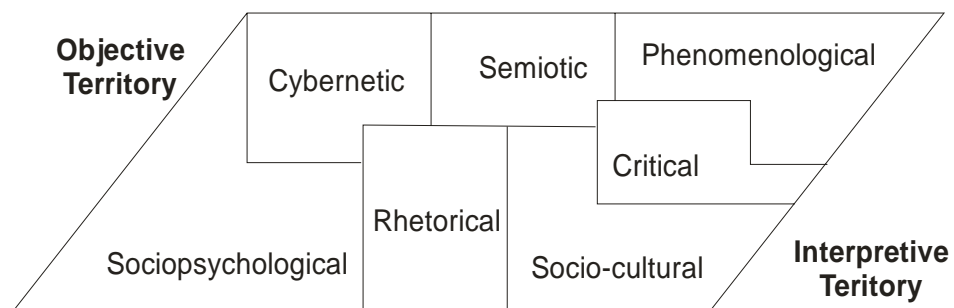
E. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian (*Efendi & Singarimbun, 1989: 37*). Berdasarkan pada batasan tersebut maka akan dijelaskan batasan-batasan tentang:

E. 1. Perspektif Interpretif dalam Komunikasi

Perspektif sering kita kenal dengan makna yang lebih mudah yaitu sudut pandang. Bagaimana seseorang menilai, memandang suatu fenomena sosial yang ada. Sudut pandang setiap individu tentunya berbeda-beda, satu sama lain saling melengkapi atau bahkan saling mengkritisi. Interpretasi adalah hasil dari sebuah perspektif atau sudut pandang tertentu. Sehingga interpretif merupakan suatu kajian yang menghasilkan sesuatu sesuai dengan interpretasi dan penafsiran dari sang peneliti. Dalam peta tradisi komunikasi terdapat dua kutub yang saling berlawanan namun selalu berkaitan, wilayah objektif dan wilayah interpretif.

Gambar 1.1



Sumber: (*Griffin, 2003: 33*).

Dapat kita lihat dari peta tradisi komunikasi di atas bahwa tradisi kritis berada dalam wilayah interpretif. Dalam hal ini wilayah interpretif lebih

menitik beratkan pada penentuan makna dan nilai dalam teks komunikatif. Walaupun tidak ada teori interpretif yang diakui secara universal (keseluruhan), para budayawan dan para penafsir berulang kali meminta teori itu sebaiknya disempurnakan sebagian atau seluruhnya sesuai dengan fungsi-fungsi berikut: menciptakan pemahaman, nilai identitas, mengilhami penghargaan estetis, meningkatkan persesuaian, dan memperbaiki masyarakat (Griffin, 2003: 44).

Interpretif berasumsi bahwa ilmu pengetahuan selalu dilihat dari sudut-sudut tertentu. Kata, bahasa tubuh atau tindakan mempunyai keterpautan terhadap yang telah diberikan oleh suatu kelompok, dalam hal ini sangat berbahaya untuk mengasumsikannya dengan hal yang berseberangan dengan hal tersebut (Griffin, 2003: 509).

Komunikasi melibatkan proses pemaknaan pesan sehingga proses komunikasi melibatkan pula interpretasi. Interpretasi merupakan suatu proses pemberian makna dan pemahaman pengalaman "*Interpretation is a process of assigning meaning and understanding experience*" (Littlejohn dalam Fiske, 2004: 130).

Dalam perspektif interpretif tidak ada kebenaran yang mutlak ataupun kesalahan yang absolut. Semua hal dinilai dari sudut pandang tertentu sesuai dimana ia berada dalam satu komunitas. Penilaian terhadap sebuah fakta, realita dan fenomena sosial tidak begitu saja menghasilkan suatu keputusan apakah itu baik atau buruk, benar atau salah. Semua tergantung dari sudut pandang yang diyakini. Sebuah pemaknaan akan menghasilkan suatu

konstruksi yang lambat laun terbangun tanpa kesadran dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Selain itu dapat pula timbul beberapa makna serta ambiguitas.

Interpretif menciptakan banyak realitas dan fakta. Dalam wilayah ini pembahasan lebih terpusat tentang bagaimana sebuah realitas diciptakan, bukan tentang bagaimana sebenarnya yang benar. Sebuah makna bukan hanya seperti yang terlihat, tetapi nilai dan maksud yang terkandung didalamnya tidak terbatas. Dalam perspektif ini kebenaran tentang makna menjadi bias. Tradisi kritis yang masuk dalam wilayah perspektif menjadi sebuah telaah untuk menilai, mengungkap makna dan memberikan arti terhadap suatu fenomena sosial. Mencoba mengkritisi, memberikan penilaian, serta menjadikan suatu perubahan bisa dikatakan merupakan hasil dari perspektif interpretif.

E. 2. Tradisi Kritis dalam Ilmu Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu aktivitas yang di dalamnya melibatkan proses interaksi sosial dan hubungan timbal balik antar para pelakunya. Dalam ranah kajian ilmu komunikasi (*communication field*) terdapat beberapa tradisi yang dapat digunakan untuk membantu memahami proses komunikasi tersebut. Griffin membaginya menjadi tujuh yang mencakup; (1) tradisi sosio-psikologis (*the socio-psychological tradition*), (2) tradisi sibernetik (*cybernetic tradition*), (3) tradisi retorika (*the rhetorical tradition*), (4) semiotika (*the semiotic tradition*), (5) tradisi sosio-budaya (*socio-culture*), (6) tradisi kritis (*the critical tradition*), dan (7) tradisi fenomenologi (*the*

phenomenological tradition). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tradisi kritis untuk menganalisis konstruksi pemberitaan tentang Soeharto pasca wafat pada *headline* koran Kompas edisi 28-29 Januari 2008.

Dalam tradisi kritis banyak hal yang mempengaruhi tradisi tersebut, antara lain teori kritis dari mazhab Marxisme dan mazhab Frankfurt. Kedua mazhab tersebut sangat erat hubungannya dengan tradisi kritis yang akan peneliti jabarkan. Ada beberapa jenis dari ilmu sosial kritis, yang secara garis besar mempunyai 3 sifat dasar yang utama:

- a. Tradisi kritis mencoba untuk memahami sistem *taken for granted*, struktur kekuatan, dan kepercayaan keyakinan, atau ideologi yang mendominasi kelompok.
- b. Ahli kritis sangat tertarik dalam membongkar kondisi sosial yang menindas dan susunan kekuasaan yang bertujuan untuk memajukan pembebasan atau lebih bebas dan lebih memenuhi kelompok.
- c. Ilmu sosial kritis memberikan sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk menyatukan teori dan tindakan (*Littlejohn, 2005: 47*).

Keadaan sosial yang menjadi objek penelitian merupakan sasaran dari tradisi kritis untuk dibongkar isinya. Karena tradisi adalah merekonstruksi secara simbolis melalui generasi yang turun temurun yang juga melibatkan kelestarian kebudayaan dan ketidaklestarian. Tak ada diantara itu yang mempunyai pokok maupun inti kebenaran diluar penafsiran yang terus menerus (*Negus & Pickering, 2004: 98*). Hal yang menguatkan tentang tradisi terutama teori sosial kritis disampaikan oleh Ben Agger.

Teori sosial kritis memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Teori sosial kritis berlawanan dengan positivisme. Pengetahuan adalah konstruksi aktif yang tidak sepenuhnya bebas nilai. Teori sosial kritis percaya bahwa masyarakat ditandai oleh historisitas (terus mengalami perubahan).

- b. Teori sosial kritis membedakan masa lalu dan masa kini secara umum ditandai oleh dominasi, eksploitasi dan penindasan, dan masa depan akan meluruhkan fenomena ini. Dalam hal ini teori sosial kritis mendorong kemungkinan kemajuan. Peran teori sosial bersifat politis karena berperan mdalam mendorong perubahan sosial.
- c. Teori sosial kritis berpandangan bahwa dominasi bersifat struktural, kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi oleh institusi sosial yang lebih besar seperti politik, ekonomi, budaya, diskursus, gender dan ras.
- d. Struktur dominasi direproduksi melalui kesadaran palsu manusia, dilanggengkan oleh ideologi, reifikasi, hegemoni, pemikiran satu dimensi dan metafisika keberadaan. Teori sosial kritis mematahkan kesadaran palsu dengan meyakini adanya kuasa manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif untuk mengubah masyarakat.
- e. Teori sosial kritis berkeyakinan bahwa perubahan sosial dimulai dari rumah, pada kehidupan sehari-hari manusia, menghindari determinasi dan mendukung voluntyarisme.
- f. Mengikuti pemikiran Marx, teori sosial kritis menggambarkan hubungan antara struktur dan manusia secara dialektis.
- g. Manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas kebebasan mereka sendiri serta mencegah mereka agar tidak menindas sesamanya (*Agger, 2003: 7-10*).

Ketujuh hal yang merupakan ciri teori sosial kritis di atas didukung oleh beberapa teori sosial kritis yang ada, hal ini dikarenakan tidak ada satu teori yang secara eksplisit mengandung ketujuh unsur tersebut. Banyak ahli kritis yakin bahwa pertentangan, ketegangan dan konflik merupakan aspek yang tidak dapat terelakkan dari tujuan sosial dan tidak akan pernah bisa dihapuskan (*Littlejohn, 2005: 317*).

Jika seseorang termasuk dalam kelompok marjinal, maka akan segera melihat nilai tentang tradisi kritis menimbulkan perlawanan. Dalam berbagai cara, tradisi kritis adalah sebuah kerja keras meningkatkan kesadaran. Banyak ahli kritis percaya bahwa pertentangan, ketegangan, konflik adalah aspek yang tidak dapat dielakkan dari fenomena sosial dan tidak akan pernah bisa dihapuskan (*Littlejohn, 2005: 317*).

Dalam hal ini kehidupan masyarakat yang terpinggirkan merupakan hasil dari sistem perekonomian. Secara gamblang, kita bisa lihat bahwa kehidupan

individu ataupun kelompok yang terpinggirkan tersebut berada di posisi menengah ke bawah. Yakni sebagai para pekerja, buruh dan kaum miskin.

Marx berpikir bahwa alat/cara dari produksi dalam masyarakat menentukan sifat dasar dari masyarakat, jadi ekonomi adalah dasar dari semua struktur sosial. Dalam sistem kapitalis, keuntungan mengendalikan produksi, yang sebelumnya menindas buruh atau kelas pekerja (*Littlejohn, 2005: 47-48*).

E. 3. Komunikasi sebagai Proses Produksi Makna

Komunikator, komunikan, pesan, dan media merupakan sebagian dari elemen-elemen yang ada pada proses komunikasi. Proses komunikasi itu sendiri bukan hanya bagaimana cara atau pesan apa yang sampai pada komunikan, akan tetapi komunikasi yang baik yaitu bagaimana pesan yang sampai tersebut dapat mengandung makna-makna tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai *feedback*. Pada dasarnya, komunikasi merupakan proses penyampaian dan pemaknaan pesan (*Fiske, 2004: 15*).

Dalam pandangan tentang komunikasi, Fiske mengklasifikasi studi komunikasi dalam dua mazhab. Mazhab pertama melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Mazhab kedua melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Kedua mazhab ini memiliki karakteristik masing-masing yang menjadi hal utama atau hal inti di dalam memahami tentang kedua mazhab ini.

Mazhab pertama adalah mazhab yang melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Dalam hal ini melihat komunikasi sebagai sebuah proses dimana didalamnya yang diamati adalah bagaimana pengirim dan penerima mengkonstruksi pesan dan menerjemahkannya dan bagaimana transmitter

menggunakan saluran dan media komunikasi. Dalam pandangan mazhab ini komunikasi dilihat sebagai suatu proses dimana seorang pribadi mempengaruhi perilaku atau *state of mind* pribadi yang lain. Mazhab ini cenderung mempergunakan ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, dan cenderung memusatkan dirinya pada tindakan komunikasi (*Fiske, 2004: 9*).

Mazhab kedua melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Dalam hal ini komunikasi berkenaan dengan bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan orang-orang yang dalam rangka menghasilkan makna. Dimana mazhab ini melihat bahwa komunikasi terkait dengan teks dan kebudayaan, karena itu komunikasi dianggap sebagai studi tentang teks dan kebudayaan. Metode studi yang utama adalah semiotika (ilmu tentang tanda dan makna) (*Fiske, 2004: 9*). Mazhab ini cenderung menggunakan linguistik dan subjek seni dan cenderung terpusat pada karya komunikasi.

Setiap mazhab mendefinisikan tentang komunikasi sebagai interaksi sosial melalui pesan dengan caranya sendiri. Mazhab proses mendefinisikan interaksi sosial sebagai proses dimana seorang individu berhubungan dengan individu lain (*Fiske, 2004: 9*). Dalam sebuah interaksi atau proses komunikasi dimungkinkan terjadi sebuah sikap perubahan perilaku *state of mind* atau respon emosional yang lain. Mazhab semiotika mendefinisikan interaksi sosial sebagai sesuatu yang membentuk individu selaku anggota dari suatu budaya atau masyarakat tertentu. Bagi mazhab pertama atau yang lebih dikenal dengan mazhab proses pesan dilihat sebagai sesuatu yang ditransmisikan

melalui proses komunikasi. Dan dalam proses komunikasi itu, tujuan (Intention) adalah faktor krusial dalam memutuskan apa yang membentuk sebuah pesan. Dalam hal ini pesan diartikan sebagai apa yang pengirim sampaikan dengan sarana apapun. Sedangkan mazhab kedua atau yang lebih identik dengan mazhab semiotika memiliki anggapan bahwa pesan merupakan suatu konstruksi tanda dimana melalui interaksinya dengan penerima menghasilkan makna tertentu. Dimana dalam hal ini pengirim yang diartikan sebagai transmitter pesan, menurun arti pentingnya. Dalam hal ini mazhab ini lebih menekankan pada teks dan bagaimana teks itu dibaca. Sedangkan membaca adalah proses menemukan makna ketika pembaca berinteraksi dengan teks. Dalam mazhab ini, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan dalam menemukan makna dalam satu teks yang sama. Hal ini disebabkan karena pembaca memiliki pengalaman sosial yang berbeda atau memiliki budaya yang berbeda (*Fiske dalam Rachman, 2008: 13*).

Bagi peneliti perlu adanya perhatian pada kedua mazhab, terlepas dari keberpihakan pada satu mazhab. Sebab bisa jadi seperti yang diungkapkan oleh Fiske kedua mazhab tersebut bisa saling mengisi dan tidak saling menegasikan antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Bagi mazhab proses terlihat lebih sederhana karena konsentrasi dari penelitian ini terletak pada subjek dan media atau proses transmisi pesan bisa berjalan dengan sempurna. Sedangkan pada mazhab semiotika ada faktor-faktor luar yang sangat dominan dalam mempengaruhi pemaknaan/produksi makna, seperti halnya ideologi, sistem religi atau latar belakang masyarakat yang membentuk

persepsi individu (state of mind). Dimana dalam hal ini sebenarnya peneliti tertarik melihat pengaruh luar atau lingkungan dalam proses produksi makna.

Pada hakikatnya model-model makna memiliki bentuk yang secara umum mirip, masing-masing memperhatikan tiga unsur yang mesti ada dalam studi tentang makna. Unsur-unsur yang dimaksud itu adalah tanda, acuan tanda dan pengguna tanda (*Fiske, 2004: 61*). Tanda merupakan sesuatu yang bersifat materi, bisa dipersepsi indra kita. Tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri dan tergantung oleh pengenalan penggunanya sehingga bisa disebut dengan tanda.

Kajian tentang tanda ini diperdalam oleh beberapa tokoh. Mereka seperti pierce (1931-1958) dan Ogden dan Richard (1923). Mereka mengidentifikasi relasi segitiga antara tanda, pengguna dan realitas eksternal sebagai suatu keharusan untuk mengkaji makna. Pierce mengatakan:

Tanda adalah sesuatu yang dikaitkan pada seseorang untuk sesuatu dalam beberapa hal atau kapasitas. Tanda menunjuk pada seseorang, yakni, menciptakan di benak orang tersebut suatu tanda yang setara, atau barangkali suatu tanda yang lebih berkembang, tanda yang diciptakannya saya namakan interpretant dari tanda pertama. Tanda itu menunjukkan sesuatu yakni objeknya (*Fiske, 2004: 63*).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa proses produksi makna tidak dapat dilepaskan dari konsep mental dari pengirim dan penerima. Dalam hal ini, kedua unsur tersebut saling mempengaruhi. Dimana pengirim yang dalam hal ini merupakan penulis atau wartawan selalu dipengaruhi oleh konsep mental atau kognisi yang ia miliki, sedangkan penerima atau pembaca dalam memahami makna tersebut dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki pula. Dalam demikian, kerangka teori tentang produksi makna ini dapat

digunakan sebagai suatu acuan dalam melakukan penelitian tentang analisis wacana. Tepatnya dalam hal produksi makna oleh media/wartawan di dalam pemberitaannya tentang wafatnya Soeharto.

Berdasarkan hal di atas, teori tersebut dapat dijadikan acuan dalam menganalisis konstruksi pemberitaan tentang Soeharto pasca wafat pada *headline* koran Kompas edisi 28-29 Januari 2008.

E. 4. Bias Media dan Produksi Berita

Berita didefinisikan oleh William S. Maulsby sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut (*Sumandiria, 2005: 64*).

Berita secara umum dapat didefinisikan sebagai laporan tercepat mengenai suatu fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan penting bagi sebagian besar khalayak melalui berbagai media seperti televisi, surat kabar, radio atau media online internet (*Rachman, 2008: 17*).

Menurut Fishman ada dua kecenderungan studi tentang proses produksi berita. Pandangan pertama disebut pandangan seleksi berita (*selektif of news*). Pada dasarnya proses produksi berita adalah proses seleksi. Proses seleksi ini akan dimulai dari wartawan dimana dalam hal ini wartawan di lapangan akan memilih hal-hal atau peristiwa-peristiwa penting yang akan ditulis dalam berita. Seleksi berikutnya ada di meja redaktur. Pada bagian ini redaktur akan menyeleksi dan menyunting berita yang masuk ke meja redaksi. Redaktur akan melihat dan memperhatikan berita-berita yang masuk ke meja redaksi

untuk diseleksi bagian mana yang harus dihilangkan dan bagian mana yang harus ditambah. Pandangan ini melihat bahwa ada realitas yang benar-benar riil yang ada di luar diri wartawan, dan realitas yang riil inilah yang akan diseleksi oleh wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita yang akurat dan menarik (*Eriyanto, 2000: 100*).

Pendekatan kedua adalah pendekatan pembentukan berita. Perspektif ini menggambarkan bahwa sebuah peristiwa bukan diseleksi melainkan dibentuk. Pandangan ini melihat bahwa wartawanlah yang membentuk peristiwa, mana yang layak disebut berita dan mana yang tidak. Pandangan ini melihat bahwa peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi melainkan dikreasi oleh wartawan. Perspektif ini kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana wartawan membuat berita. Titik perhatian terutama di fokuskan dalam rutinitas dan nilai-nilai kerja wartawan yang memproduksi berita tertentu. Ketika bekerja, wartawan bertemu dengan seseorang. Wartawan bukanlah perekam yang pasif yang mencatat apa yang terjadi dan apa yang dikatakan seseorang. Melainkan sebaliknya, ia aktif. Wartawan berinteraksi dengan dunia (realitas) dan dengan orang yang diwawancarai, dan sedikit banyak menentukan bagaimana bentuk dan isi berita yang dihasilkan (*Eriyanto, 2000: 100*).

Berita dihasilkan dari pengetahuan dan pikiran, bukan karena ada realitas objektif yang berada di luar, melainkan karena orang akan mengorganisasikan dunia yang abstrak ini menjadi dunia yang koheren dan beraturan serta memiliki makna (*Fishman dalam Eriyanto, 2000: 101*). Hal ini terjadi sebab proses terbentuknya berita tidak mirip dengan proses aliran. Ada informasi

yang dimabil wartawan, informasi itu lalu di dikoreksi oleh redaktur dan seterusnya.

Untuk mengurangi subjektifitas dari wartawan dalam menulis berita perlu diperhatikan beberapa hal yang menurut Gaye Tuchman dapat membuat berita yang ditulis wartawan dapat objektif. Tuchman menyebut prosedur ini sebagai “ritual” karena ia dikonstruksi untuk wartawan ketika ia menulis berita. Menurut Tuchman terdapat ada empat strategi dasar yang harus dilakukan wartawan agar berita yang ditulis dapat objektif. Pertama, menampilkan semua kemungkinan konflik yang akan muncul. Ketika seseorang wartawan membuat berita, sudah semestinya ia mengumpulkan dan meneliti banyak data dan multi perspektif misalnya mewawancarai banyak orang yang sudah jelas bersebrangan, tidak hanya melihat pada satu data dan satu pihak saja. Jadi semua realitas dan semua kemungkinan fakta disajikan oleh wartawan. Kedua, menampilkan fakta-fakta pendukung yang berfungsi sebagai argumentasi bahwa yang disampaikan wartawan bukanlah khayalan dan opini pribadi. Ketiga, pemakaian kutipan pendapat ntuk menyatakan bahwa yang disajikan bukan pendapat wartawan. Keempat, menyusun informasi dalam tata urutan tertentu agar lebih jelas mana pihak yang berkomentar dan mana pihak yang dikomentari (*Rachman, 2008: 18*).

Penelitian dalam level produksi berita, seringkali dipusatkan pada proses pembentukan berita atau yang lebih dikenal dengan *newsroom*. *Newsroom* dalam hal ini dipandang sebagai ruang yang hampa, netral, dan seakan-akan hanya menyalurkan informasi yang didapat. Proses pembentukan berita

merupakan sesuatu yang rumit dan banyak faktor yang berpotensi untuk mempengaruhinya (Sudibyo, 2006: 6).

Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam bukunya "*Mediating The Message*" mengungkapkan "... and we establish that media do not always mirror reality" (Shomaker & Reese, 1996: 7). (dan kami membuktikan bahwa media tidak selalu mencerminkan realitas). Proses pembentukan sebuah berita tidak dapat dibayangkan sebagai proses menulis realitas secara penuh yang sesuai dengan realitas sebenarnya. Namun ada beberapa bagian di dalam realitas itu yang diambil dan digunakan oleh wartawan dalam menyusun berita. Wartawan akan mengambil bagian-bagian yang menarik untuk kemudian di konstruksi menjadi sebuah berita. Dengan kata lain berita yang ada di media bukanlah cerminan realitas sepenuhnya tetapi merupakan hasil konstuksi dari wartawan yang menulis berita.

Peter L. Berger mengatakan bahwa sebuah teks berupa berita tidak bisa disamakan seperti *copy* dari realitas, namun ia harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas, karenanya sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi berbeda (Eriyanto, 2000: 17). Dalam hal ini berita dipandang bukan merupakan cermin dari realitas semata namun merupakan hasil konstruksi dari wartawan. Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau fakta yang ditulis begitu saja sebagai cermin dari realitas tetapi dalam hal ini berita adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Realitas diamati oleh wartawan kemudian diserap dalam kesadaran wartawan dan akhirnya dikonstruksi oleh wartawan menjadi

sebuah berita yang menarik. Untuk menampilkan berita yang menarik wartawan akan mengambil bagian-bagian yang menarik untuk dikonstruksi menjadi sebuah berita.

Pada dasarnya berita-berita yang disajikan dan ditampilkan oleh media dalam pemberitaan yang dimuat merupakan akumulasi dari pengaruh yang beragam dan mempengaruhi konstruksi realitas oleh media. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese mengungkapkan berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan. Faktor-Faktor itu adalah:

1. *Faktor Individu.*

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang kehidupan wartawan seperti jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, dan budaya. Faktor ini akan sangat mempengaruhi pola pemberitaan dan pengambilan keputusan oleh wartawan dalam menulis berita. Dalam menurunkan sebuah berita media selalu dipengaruhi oleh aspek-aspek personal wartawan, dampak dari hal ini adalah wartawan akan memutuskan realitas mana yang akan dimuat dan mana yang tidak akan dimuat dalam pemberitaan yang akan disajikan di dalam media.

2. *Rutinitas media.*

Media dalam menghasilkan sebuah berita sangat dipengaruhi oleh rutinitas yang terjadi selama proses pembentukan berita hingga sampai ketangan pembaca. Rutinitas ini dimulai dari saat wartawan memasukkan berita yang ditulis ke meja redaksi, dan di meja redaksi dilakukan pemilihan-

pemilihan terhadap informasi-informasi yang memiliki nilai berita. Proses kerja rutinitas inilah yang menentukan kenapa sebuah peristiwa dihitung sebagai berita dan kenapa peristiwa lain tidak dihitung sebagai berita. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kenapa sebuah peristiwa ditonjolkan pada bagian tertentu dan kenapa peristiwa yang lain tidak ditonjolkan. Kalau media menampilkan aspek tertentu dalam pemberitaannya, bukan berarti media tersebut memerankan peran negatif dalam proses produksi berita untuk mengelabui pembacanya, namun hal ini terjadi sebagai bagian dari rutinitas media dalam melakukan seleksi terhadap realitas yang ada yang akan dimunculkan dalam terbitannya. Pada posisi inilah peran readaktur sangat besar dan kuat dalam menentukan pemberitaan, sebab readaktur memiliki otoritas penuh dalam memilih berita yang layak dan tidak layak untuk dimuat dalam media massa.

3. *Institusi Media.*

Orang-orang yang duduk dalam dewan redaksi atau yang direkrut sebagai pegawai sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi media. Dalam hal ini wartawan, editor, layouter dan fotografer adalah bagian kecil dari institusi media. Pengelola media dan wartawan bukanlah orang tunggal yang menentukan isi sebuah berita. Ada aspek lain yang dapat mempengaruhi isi sebuah berita. Aspek-aspek itu adalah pengiklan dan pemodal. Dalam hal ini kepentingan ekonomi seperti pemilik modal, pengiklan, dan pemasaran selalu mempertimbangkan sebuah peristiwa yang dapat

menaikkan angka penjualan atau oplah media. Dalam hal ini terkait dengan wilayah ekonomi.

4. *Kekuatan Eksternal media.*

Dalam hal ini kita akan melihat bahwa media hanya menjadi bagian kecil dari sistem yang lebih besar dan kompleks dari kehadiran sebuah berita. Dalam perspektif ini diyakini bahwa kepentingan politik, ekonomi, dan budaya merupakan faktor dominan yang mempengaruhi isi berita. Faktor-Faktor itu adalah :

a. *Faktor yang berasal dari sumber berita.*

Sumber berita dalam hal ini tidak dilihat sebagai pihak yang netral dalam memberikan informasi untuk bahan berita. Dalam hal ini sumber informasi juga memiliki kepentingan untuk mempengaruhi isi media dengan alasan-alasan tertentu, seperti untuk membangun citra positif terhadap suatu pihak sehingga masyarakat menjadi ikut dalam mendukung argumentasi yang diberikan sumber kepada media.

b. *Sumber penghasilan media.*

Dalam hal ini terdapat keterkaitan antara keberlangsungan media dengan modal. Untuk menjaga keberlangsungannya, sebuah media membutuhkan dana sebagai sumber untuk membiayai produksinya. Salah satu sumber dana di dalam media adalah iklan. Dengan iklan sebuah media dapat menjaga keberlangsungan hidupnya. Hal ini menyebabkan media menjadi tergantung pada iklan. Ketergantungan

ini akan berimplikasi atau berpengaruh pada objektifitas media dalam memberitakan suatu masalah kepada pembaca.

c. *Level Ideologi.*

Dalam konteks ini ideologi diartikan sebagai kerangka berpikir yang dipakai oleh setiap individu untuk melihat realitas dan bagaimana individu tersebut menghadapi, dalam hal ini individu yang dimaksud adalah wartawan. Ideologi dalam hal ini adalah suatu konsep abstrak yang berhubungan dengan konsepsi individu dalam menafsirkan realitas. Ideologi yang abstrak dipahami sebagai siapa yang berkuasa dan siapa yang menentukan bagaimana media tersebut akan dipahami oleh publik (*Sudibyo, 2006: 7-12*).

Pada dasarnya, sebuah berita seharusnya menyampaikan dan menyebarkan realitas sosial kepada masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya kita melihat bahwa berita yang disampaikan terkadang jauh dari realitas sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Berita lebih merupakan hasil rekonstruksi tertulis dari realitas sosial (*Abrar, 1999: 77*).

E. 5. Hegemoni Kekuasaan

Antonio Gramsci memperkenalkan hegemoni, yang dalam hal ini mungkin kita pikir ideologi sebagai perjuangan. Hegemoni melibatkan memenangkan dan memenangkan kembali secara terus menerus kesepakatan dikalangan mayoritas terhadap sistem yang menempatkan mereka sebagai subordinat. Ada dua unsur yang lebih ditekankan Gramsci dibandingkan Marx atau Althusser yakni resistensi dan instabilitas (*Fiske, 2004: 243*).

Pada dasarnya Gramsci berpandangan bahwa hegemoni berbeda dengan ideologi sebab hegemoni tidak semata-mata merujuk pada nilai-nilai kelas dominan melainkan sebagai bagian dari tatanan alamiah atas segala sesuatu yang dipaksakan oleh proses-proses tersebut (*Cavallaro, 2004: 141-142*). Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan kelas sosial lainnya. Oleh karenanya hegemoni pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengajak dan menggiring orang agar menilai dan memandang permasalahan sosial dalam *frame* yang telah ditentukan.

Williams (1960) berpendapat bahwa hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai diktator. Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi lainnya. Dalam upaya memisahkan negara (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*), Gramsci memulai dengan tiga batas konseptualisasi dalam membicarakan hegemoni.

Kesemuanya itu merujuk pada identifikasi hubungan antar formasi sosial yang membentuk garis konseptualisasi hegemoni. Ketiga batasan tersebut adalah ekonomi, negara (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Batas yang berarti (1) ekonomi sebagai batas konseptualisasi yang pertama, merupakan sebuah batasan yang digunakan untuk mengartikan *mode of production* yang paling dominan dalam sebuah masyarakat, (2) batasan negara merupakan batas yang berarti tempat munculnya praktek-praktek kekerasan (polisi dan aparat kekerasan lainnya) dan tempat terjadinya pendirian birokrasi negara, dan (3) masyarakat sipil (*civil society*) (*Cavallaro, 2004: 136-137*).

Batasan negara (*political society*) berarti menunjuk pada institusi-institusi kenegaraan dan masyarakat sipil (*civil society*) merupakan batasan yang menunjuk pada organisasi lain di luar negara dalam sebuah formasi sosial.

Pada dasarnya Gramsci mendefinisikan negara, dengan dua pokok batasannya yaitu dalam pengertian ‘terbatas’ dan ‘diperluas’. Kedua konsep itu secara bersamaan dielaborasi olehnya di dalam penjara. Dalam masalah ini Gramsci memakai penjelasan yang dominan dalam gagasannya tentang negara.

It should be remark that the general nation of the State includes elements which need to be referred back to the nation of civil society (in the sense that one might say that State + political society, in other words hegemony protected by the armour of coercion) (Cavallaro, 2004: 139).

(Haruslah dicatat bahwa pandangan umum tentang negara mencakup unsur- unsur yang harus dirujuk ulang pada pandangan tentang masyarakat sipil (dalam pengertian ini orang akan mengatakan bahwa negara = masyarakat politik + masyarakat sipil. Atau dalam kata lain, hegemoni yang dilindungi oleh kekerasan bersenjata).

Dominasi, dalam perspektif Gramscian menegaskan kembali hakikat negara sebagai alat kekerasan untuk menjaga kekuasaan kelas dominan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (*consensus*).

Dalam memperbincangkan hubungan kekuatan dalam setiap negara, hubungan internasional harus diperhatikan, tetapi sebagaimana dinyatakan Gramsci, titik berangkatnya harus ‘nasional’:

Kenyataannya, hubungan internal dari setiap bangsa merupakan hasil dari kombinasi yang “asli” dan (dalam pengertian tertentu) khas: hubungan-hubungan ini harus dipahami dan dipandang dalam keaslian dan kekhasannya jika kita ingin menguasai dan mengarahkannya. Yang pasti, garis perkembangannya adalah menuju internasionalisme, tetapi titik berangkatnya adalah ‘nasional’ dan dari titik berangkat inilah kita harus mulai (*Simon, 2001: 41*).

Menurut Gramsci, ideologi tidak bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya, tetapi harus dinilai dari ‘kemanjurannya’ dalam mengikat

berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam satu wadah, dan dalam peranannya sebagai pondasi atau agen proses penyatuan sosial suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan kepentingan-kepentingan dari suatu kelas, kelompok dan gerakan-gerakan lain ke dalam kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional (*Simon, 2001: 86-87*). Dan satu yang penting dan perlu diingat bahwa hegemoni mampu mengkonstruksi “anggapan umum” (*common sense*).

Dennis Mumby memberikan suatu teori persuasi hegemoni yang mengilustrasikan proses terjadinya hegemoni dengan banyak cara dan setting. Dia menunjukkan bagaimana organisasi merupakan jaringan yang menyebabkan munculnya hegemoni perjuangan dan kekuasaan dibangun oleh salah satu dominasi ideologi. Mumby juga menunjukkan bagaimana budaya organisasi terlibat dalam proses politik yang dibawahnya. *Communication within the organization serves not only to establish meaning but also to create power and domination* (komunikasi dalam organisasi tidak hanya berperan membentuk makna, tapi juga menciptakan kekuasaan dan dominasi) (*Littlejohn, 2005: 229*). Sehingga peristiwa atau teks yang diinterpretasikan oleh hegemoni hanya akan menonjolkan kelompok dominan dan memarjinalkan kelompok bawah. Disini hegemoni memainkan peran dalam proses dominasi yang mencoba memasukkan suatu ide atau nilai dan menyingkirkan ide atau nilai lainnya.

E. 6. Ideologi Sebagai Praktek

Secara sederhana ideologi dapat diartikan sebagai sebuah ide dan gagasan. Istilah Ideologi pertama kali digunakan oleh Filsuf Prancis, Destut de Tracy yang mengacu pada studi tentang ide. Selanjutnya ideologi dapat diartikan sebagai spekulasi ideal atau teorisasi visioner yang mengacu pada sistem ide-ide tentang fenomena terutama fenomena kehidupan sosial; cara berpikir khas suatu kelas atau individu (*Aiken, 2002: 2*).

Sedangkan teori ideologi sebagai sebuah praktek dikembangkan oleh Luis Althusser (1997). Teori ini merupakan sebuah perkembangan pemikiran dari konsep ideologi sebagai kesadaran palsu dalam teori Marx. Bila ideologi sebagai sebuah praktik berlaku diseluruh kelas. Maka menurut Althusser, ideologi terdapat dalam struktur masyarakat itu sendiri dan muncul dari praktek-praktek nyata yang diselenggarakan oleh institusi-institusi dalam masyarakat.

Salah satu kontribusi Althusser yang paling vital dalam perdebatan mengenai ideologi terdapat dalam pernyataan bahwa ideologi tidak semata-mata merefleksikan basis ekonomi masyarakat tetapi ideologi memiliki eksistensi materialnya tersendiri sebabagai sebuah praktek dan aktivitas produksi. Produksi utama ideologi adalah subjek manusia (human Subject) (*Cavallaro, 2004: 135*).

Althusser memberikan definisi tentang ideologi dalam dua tesis utama. Tesis pertama ideologi merepresentasikan secara imajiner relasi antara individu-individu dengan kondisi eksistensinya yang nyata. Tesis kedua,

memandang ideologi selain sebagai sebuah gagasan ideologi juga memiliki basis material (*Junaedi, 2007: 48*).

Dalam sisi perspektif lain ideologi dikatakan sebagai peta-peta makna yang meski berpretensi mengandung kebenaran universal, sebenarnya merupakan pemahaman historis yang menopangi dan melanggengkan kekuasaan atau gagasan yang berkuasa adalah gagasan milik penguasa (*Barker, 2005: 13*). Louis Althusser memperkenalkan dua istilah untuk memahami ideologi:

Pertama *Ideological State Apparatus* (ISA) dan *Repressive State Apparatus* (RSA). Dalam terminologi Marxian, aparat negara yang represif (*State Apparatus*) terdiri dari pemerintah, tentara, polisi, birokrasi, pengadilan, penjara dsb. Inilah yang oleh Althusser kemudian dinamakan sebagai RSA. RSA menjalankan fungsinya melalui kekerasan (*by violence*), baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Sedangkan ISA menjalankan fungsinya secara ideologis (*by ideology*). Pada titik inilah terlihat secara jelas perbedaan antara ISA dan RSA. Karena itu ISA tidak bisa disamakan dengan RSA. Secara lebih jelas Althusser memaparkan hal ini dengan beberapa alasan yaitu bahwa, pertama, hanya ada satu RSA, namun pada sisi yang lain terdapat pluralitas ISA. Kedua, RSA bergerak terbatas ada wilayah publik, sedangkan ISA dapat bergerak ke wilayah privat, seperti melalui lembaga agama, keluarga, sekolah, media massa dsb. Memang, RSA dapat menjalankan fungsinya baik melalui kekerasan maupun ideologi, tetapi RSA berfungsi secara massif dan didominasi dengan kekerasan. Artinya memang tidak ada RSA yang benar-benar menjalankan fungsinya hanya melalui kekerasan semata, misalnya polisi atau militer yang juga berfungsi secara ideologis untuk menanamkan aturan untuk menjaga stabilitas. Namun hal ini tidak dapat disebut sebagai ISA karena dalam ISA, fungsi primernya adalah secara ideologis baru kemudian secara sekunder melalui kekerasan. Bagi Althusser tidak ada kelas dalam masyarakat yang dapat memegang kekuasaan tanpa melakukan hegemoni dan menjalankan ISA.

Althusser memberikan perbedaan dasar dari apparatus Negara (Represif) yaitu: apparatus Negara yang bersifat represif berfungsi ‘melalui kekerasan’, sementara apparatus Negara Ideologis berfungsi ‘melalui *ideologi*’. RSA pada mulanya bersifat menindas dan menggunakan fisik karena bergerak dalam lingkup kekerasan yang kemudian diberi arti ideologis, ISA bersifat sebaliknya. Keduanya dapat saling berintegrasi dalam rangka represif negara. RSA mengamankan kondisi politik yang diciptakan oleh ISA dengan tindakan manipulatif kesadaran warga masyarakat (*Eriyanto, 2001: 98-99*).

Pandangan tentang ideologi sangat beragam. Di sisi lain ideologi dipandang sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas yang terjadi di dalam kehidupan. Ideologi berhubungan dengan konsepsi seseorang dalam menafsirkan realitas (*Sudibyo, 2006: 12*). Menurut Gramsci, ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Ia membedakan antara sistem yang berubah-ubah (*arbitrary systems*) yang diungkapkan oleh intelektual dan filosof tertentu, dan ideologi organik yang bersifat historis (*historical organic ideology*) yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi tertentu. Menurutnya ideologi mengatur manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak mendapatkan kesadaran akan posisi mereka dan perjuangan mereka. Ideologi bukanlah fantasi perorangan namun terjelma dalam cara hidup kolektif masyarakat (*Simon, 2001: 82*).

Gramsci berpendapat bahwa sering kali terdapat kontradiksi antara filsafat atau konsepsi mengenai dunia atau agama yang diyakini oleh manusia secara

sadar dengan aturan tingkah laku manusia. Selain itu terdapat juga aspek penting lainnya dari watak material ideologi. Praktek ideologi mempunyai agen-agensya sendiri dalam bangunan kaum intelektual yang mana mereka itu mengkhususkan diri dalam menjabarkan ideologi-ideologi yang organik dan mengemban tugas melaksanakan reformasi moral atau intelektual (*Simon, 2001: 85*).

Ideologi memiliki eksistensi materialnya. Dalam hal ini ideologi menjelma dalam praktek-praktek sosial setiap orang dan dalam lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi dimana praktek sosial berlangsung. Organisasi itu bisa mencakup Partai Politik, serikat dagang, dan organisasi lainnya yang menjadi bagian dari masyarakat sipil seperti pers/media, LSM, aparat negara. Semua organisasi atau lembaga ini melaksanakan perannya dalam menjabarkan, mempertahankan, dan menyebarkan ideologi atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga itu memiliki efek-efek ideologis. Dalam hal ini perlu ada sebuah penekanan bahwa ideologi tidak boleh direduksi semata-mata menjadi praktek-praktek sosial. Hal ini disebabkan karena ideologi tidak hanya memiliki eksistensi material saja tetapi ideologi ada dalam dan terbentuk melalui ide-ide serta melalui hubungan antara konsep dan pernyataan (*Simon, 2001: 86*).

Gramsci berpendapat, ideologi tak bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya tetapi harus dinilai dari kemajuannya dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda kedalam suatu wadah dan dalam peranannya sebagai pondasi dan agen dalam proses penyatuan sosial.

Menurutnya suatu kelas yang hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan kepentingan-kepentingan dari suatu kelas, kelompok, dan gerakan-gerakan lain kedalam kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional (*Simon, 2001: 87*).

Untuk mengetahui ideologi media secara lebih detail, perlu diperhatikan tiga aspek yang saling terkait dan berhubungan di dalam media tersebut terkait dengan ideologi yang dibawa. Tiga aspek analisis itu adalah proses produksi dan transmisi pesan, konstruksi pesan media, penangkapan atau pemahaman masyarakat atas pesan media ini. Jhon B. Thompson mengatakan bahwa tiga aspek ini sangat akurat untuk menganalisa ideologi media, (*Thompson asserts that his tripartite model is well suited to ideological media analysis for a number of reason*) (*Devereux, 2003: 104*)

Dari ketiga aspek ini dapat diamati dan dianalisis tentang ideologi. Ketiga aspek ini dikombinasikan untuk melihat dan menganalisis ideologi yang ada di dalam media. Hal ini dimulai dari proses interpretasi untuk mencari hubungan antara pesan-pesan media terkait dengan proses produksi dan konstruksi pesan dengan hubungan sosial dimana pesan-pesan ini diterima dan dimengeri oleh individu-individu. Dalam proses ini dapat digali lebih dalam tentang karakter ideologi dari pesan-pesan media. Dimana dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, arti sebuah pesan dikerahkan atau dikonstruksikan dengan pesan khusus dilingkungan tertentu untuk membangun hubungan dominasi.

In this way the process of interpretation can begin to explicate the ideological character of media message, that this, the ways in which the meaning mobilized by particular message may serve, in certain

circumstances, to establish and sustain relation of domination (Devereux, 2003: 105)

(Dalam cara ini, proses menginterpretasikan dapat dimulai untuk menggali karakter ideologis dari pesan-pesan media, itulah cara dimana arti dikerahkan dengan pesan khusus diterapkan dilingkungan tertentu untuk membangun dan menopang hubungan dominasi).

Ideologi dalam teks media juga dapat dilihat melalui struktur wacana di dalam isi media tersebut. Hal ini disebabkan analisis wacana kritis memiliki kekuatan untuk memahami ideologi di balik media. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisa tentang bagaimana teks media diproduksi dan bagaimana teks media ini dipengaruhi oleh ideologi media.

Pemahaman tentang dimensi wacana dalam teks media adalah aspek penting dalam melakukan analisis ideologi media. Wacana di media didukung oleh ideologi dominan hingga melegitimasi hubungan yang tidak setara dari kekuasaan. Dengan mengamati dan menganalisis teks media di level mikro dengan cara sistematis kita dapat mengetahui bagaimana teks dibentuk sebagai wacana. Selain itu kita juga dapat mengamati apakah wacana dalam teks tersebut mendukung atau tidak, bahkan menjadi lawan dari ideologi dominan. Untuk mengamati tentang produksi dan penangkapan teks media, kita perlu melakukan pemahaman mendalam dan kritik tentang wacana dalam teks media.

Berdasarkan teori tentang ideologi di atas, dapat diketahui bahwa antara wacana dan ideologi adalah hal yang saling melengkapi. Dimana untuk mempelajari ideologi media, kita harus melihat pesan pemberitaan secara tekstual dan kontekstual.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian, metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah (*Surachman, 1990: 34*). Penelitian ini akan menggunakan analisis wacana yang mulai populer dan sering digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang ada.

F. 1. Analisis Wacana Kritis

Wacana secara sederhana dapat diartikan sebagai pembicaraan yang didalamnya terdapat gagasan atau ide. Saat ini kata wacana begitu banyak dibicarakan dan digunakan di dalam kehidupan. Istilah wacana digunakan oleh berbagai disiplin ilmu. Dengan kata lain wacana saat ini memiliki makna yang begitu luas dengan berbagai macam penafsiran dan interpretasi. Luasnya penafsiran dan pemaknaan atas kata wacana itu disebabkan oleh perbedaan lingkup dan disiplin ilmu yang menggunakan istilah wacana. Istilah wacana saat ini sering digunakan oleh berbagai disiplin ilmu yang tentunya memiliki perbedaan penafsiran dan pandangan tentang makna dari kata wacana tersebut.

Walaupun istilah analisis wacana secara umum dipakai dalam banyak disiplin ilmu dengan berbagai macam pemahaman yang berbeda-beda namun terdapat satu titik temu yang menghubungkan berbagai definisi yang ada dari berbagai disiplin ilmu. Titik temu itu adalah bahwa analisis wacana berhubungan dengan studi tentang bahasa/pemakaian bahasa. Muhammad AS.

Hikam dalam tulisannya menyampikan tiga perbedaan dalam paradigma analisis wacana.

Pertama, pandangan kaum positivisme empiris. Kaum ini memandang analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana dalam pandangan ini diukur dengan pertimbangan kebenaran/ketidak benaran (*Eriyanto, 2001: 4*).

Kedua, pandangan konstruktivisme. Pandangan ini menolak pandangan empirisme/positivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Konstruktivisme menganggap subjek sebagai faktor sentral atau faktor utama dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam pandangan ini bahasa diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang memiliki maksud dan tujuan. Dimana di dalam pandangan ini dikatakan bahwa setiap pernyataan pada dasarnya merupakan tindakan penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan dari diri serta mengungkapkan jati diri dari pembicara (*Eriyanto, 2001: 4*).

Pandangan ketiga atau yang lebih dikenal dengan pandangan kritis. Pada pandangan ini analisis wacana difokuskan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Dalam pandangan ini individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang biasa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya. Hal ini disebabkan karena individu sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Dalam pandangan ini juga, bahasa tidaklah dilihat dan dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri pembicara. Analisis wacana

dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap bahasa. Dalam pandangan ini, bahasa dilihat selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat (*Eriyanto, 2001: 5-6*).

Dari beberapa pandangan yang telah dijabarkan di atas, penulis memandang bahwa analisis wacana kritis sangat tepat digunakan dalam meneliti tentang rumusan masalah yang ingin dijawab. Hal ini disebabkan karena analisis wacana kritis begitu luas dalam memandang bahasa. Bahasa tidak hanya dilihat sebagai studi bahasa tradisional yang menganalisis bahasa dalam konteks kebahasaan saja, tetapi dalam hal ini bahasa juga di analisis dalam konteks sosial dan kekuasaan melalui produksi dan reproduksi makna.

Pandangan Fairclough dan Wodak tentang analisis wacana kritis melihat bahwa wacana sebagai bentuk dari praktek sosial. Dalam analisis wacana kritis yang menjadi fokus perhatian utama dalam melakukan analisis secara mendalam adalah bahasa. Dalam hal ini bahasa digunakan sebagai faktor penting dalam melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Analisis wacana kritis memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan pandangan-pandangan yang lain. Karakteristik analisis wacana kritis itu adalah sebagai berikut (*Eriyanto, 2001: 8-13*).

1. Tindakan

Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Seseorang berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan

dengan orang lain. Dengan pemahaman seperti ini, ada beberapa konsekuensi tentang bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana dipandang dan dipahami sebagai sesuatu yang bertujuan. Tujuannya itu bisa bermacam-macam atau beragam, bisa untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, bereaksi dan sebagainya. Kedua, wacana diartikan sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol. Dalam hal wacana bukan sesuatu yang diluar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

2. Konteks

Latar, situasi, peristiwa dan kondisi merupakan konteks wacana yang dipertimbangkan didalam analisis wacana kritis. Dalam hal ini wacana diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Titik tolak dari analisis wacana adalah bahasa tidak dapat dimengerti sebagai mekanisme internal dari linguistik semata dan bahasa juga bukanlah suatu objek yang diisolasi dalam ruang tertutup. Bahasa bisa dipahami dalam konteks secara keseluruhan. Menurut Guy Cook ada tiga hal sentral dalam pengertian wacana. Tiga hal itu adalah teks, konteks, dan wacana. Tiga hal sentral ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek, suara, citra, dan sebagainya. Konteks memasukan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut diproduksi, fungsi

yang dimaksudkan dan sebagainya. Sementara wacana, dalam hal ini dimaknai sebagai teks dan konteks bersama-sama ada dalam suatu proses komunikasi. Studi tentang bahasa disini memasukkan konteks karena bahasa selalu ada dalam konteks dan tidak ada tindakan komunikasi tanpa partisipan, interteks, situasi dan sebagainya.

3. Historis

Dalam hal ini wacana ditempatkan dalam konteks sosial tertentu. Dimana hal ini berarti bahwa wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. (Konteks historis tertentu)

4. Kekuasaan

Dalam analisis yang dilakukan, elemen kekuasaan juga dipertimbangkan di dalam analisis wacana kritis. Dalam hal ini setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi hal itu merupakan bentuk pertarungan kekuasaan.

5. Ideologi

Ideologi juga merupakan konsep yang sentral dalam analisis wacana kritis. Hal ini disebabkan karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Wacana kritis melihat bahasa dapat berperan membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi didalamnya. Analisis wacana dapat digunakan untuk membongkar kekuasaan yang ada di dalam

setiap proses bahasa. Dalam hal ini termasuk batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang seharusnya digunakan, topik-topik apa yang akan dibicarakan. Hal ini membawa akibat yaitu pemikiran semacam ini memandang bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi yang terdapat di dalam masyarakat.

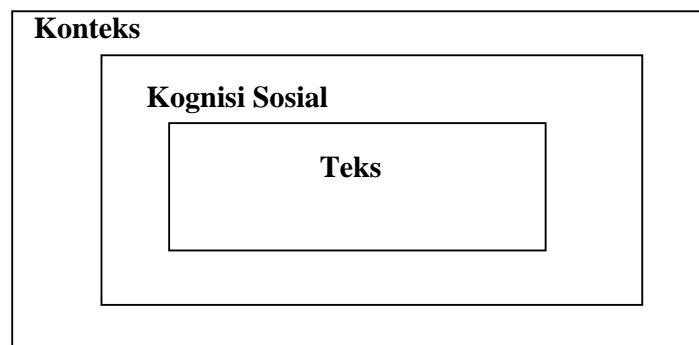
F. 2. Kerangka Analisis Teun A. Van Dijk

Dalam analisis wacana kritis terdapat banyak model yang dapat digunakan. Namun dalam hal ini peneliti menggunakan model analisis Teun A. Van Dijk atau yang lebih dikenal dengan analisis kognisi sosial. Van Dijk memandang bahwa penelitian atas wacana tidak cukup hanya dengan menganalisis teks semata. Hal ini dikarenakan teks merupakan hasil suatu praktek produksi kekuasaan. Dengan kata lain diperlukan juga pengamatan bagaimana praktek produksi teks itu (*Cahyana, 2003: 17*).

Teks merupakan sesuatu yang dibentuk di dalam praktek diskursus suatu praktek wacana (*Eriyanto, 2001: 222*). Dalam hal ini Van Dijk membuat suatu jembatan yang menghubungkan element besar berupa struktur sosial dengan elemen wacana yang mikro dengan sebuah dimensi yang dinamakan kognisi sosial. Dalam hal ini kognisi sosial memiliki dua arti. Satu sisi menunjukkan bagaimana proses teks tersebut diproduksi oleh media di sisi lain bagaimana nilai-nilai yang ada didalam masyarakat diserap oleh kognisi wartawan yang kemudian digunakan untuk menulis teks berita.

Van Dijk menggambarkan wacana memiliki tiga dimensi/bangunan. Dimensi yang menjadi perhatian utama itu adalah teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada dasarnya analisis Van Dijk ini menggabungkan ketiga dimensi itu kedalam satu kesatuan analisis. Ketiga dimensi itu memiliki pusat perhatian masing-masing. Dimensi teks meneliti bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Dimensi kognisi sosial meneliti proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Aspek ketiga yaitu konteks sosial mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu hal atau suatu permasalahan. Model analisis Van Dijk ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2



Sumber: (Eriyanto, 2001:224).

Dalam dimensi teks yang diteliti adalah struktur teks. Van Dijk memanfaatkan dan menggunakan analisis linguistik tentang kalimat, kosa kata, proposisi, dan paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. Dimensi selanjutnya adalah kognisi sosial, dalam hal ini kognisi sosial menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh individu/kelompok

pembuat teks. Pada dimensi ketiga yaitu analisis sosial, hal ini melihat bagaimana teks dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengalaman yang berkembang dalam masyarakat atas suatu wacana. Ketiga dimensi ini adalah bagian yang integral dan dilakukan secara serentak atau bersama-sama dalam analisis Van Dijk (*Eriyanto, 2001: 225*).

F. 3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini lebih di fokuskan pada konstruksi pesan yang diberitakan oleh koran Kompas tentang wafatnya Soeharto. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui konstruksi pemberitaan tentang Soeharto pasca wafat pada *headline* koran Kompas edisi 28-29 Januari 2008.

F.4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis teks. Dalam analisis teks seorang peneliti berupaya menginterpretasikan teks untuk menemukan bentuk-bentuk simbol komunikasi yang digunakan untuk menciptakan pemaknaan. Hal tersebut bertujuan untuk memaparkan atau mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam pelaksanaan penelitian. Ronald Taylor mendefinisikan bahwa:

Qualitative research as “any systematic investigation that attempts to understand the meaning things have for individuals from their own perspective.” It will work well when researchers want to understand behaviour in great depth. They look at the symbolic meaning that individuals assign to media content based on their own perspective (Folkerts & Lacy, 2001: 444).

(Penelitian kualitatif seperti “beberapa investigasi sistematis yang mencoba untuk memahami hal-hal tentang pemaknaan terhadap individu-individu dari perspektif-perspektif yang dimilikinya.” Hal ini akan berkerja dengan baik ketika peneliti ingin memahami perilaku secara

mendalam. Mereka melihat pada pemaknaan simbolik yang individu-individu berikan terhadap isi media berdasarkan perspektif yang dimilikinya masing-masing).

F. 5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti masuk ke dalam jenis *qualitative study* dengan menggunakan studi pustaka dan dokumentasi (*textual Analysis*) (Folkerts & Lacy, 2001: 444). Data diperoleh melalui observasi langsung melalui harian surat kabar Kompas edisi 28 dan 29 Januari 2008.

F. 6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada metode Van Dijk ini terdiri dari tiga komponen yaitu analisis teks, analisis kognisi sosial dan analisis konteks sosial. Ketiga komponen analisis ini merupakan komponen utama dalam analisis wacana metode Van Dijk ini. Secara lebih detail dapat di gambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Struktur	Metode
<p>Teks Menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu. Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk menyingkirkan atau memarjinalkan suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa tertentu</p>	<p><i>Critical linguistics</i></p>
<p>Kognisi Sosial Menganalisis bagaimana kognisi wartawan dalam memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis</p>	<p>Wawancara mendalam (Interteks dan interdiskursif)</p>

<p>Konteks Sosial Menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa yang digambarkan</p>	<p>Studi pustaka, penelusuran sejarah</p>
---	---

Sumber: (Eriyanto, 2001: 275).

F. 6. 1. Analisis Teks

Struktur yang digunakan untuk menganalisis teks adalah dengan struktur analisis Van Dijk. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tentang struktur teks berita tersebut. Struktur teks berita itu dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu: struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Struktur makro adalah makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema yang diangkat oleh suatu teks. Superstruktur adalah kerangka suatu teks seperti bagian pendahuluan, isi, penutup dan kesimpulan. Struktur mikro adalah makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks.

Untuk lebih jelasnya, struktur teks di atas dapat di jabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2

Struktur Wacana	Hal yang diamati	Elemen
Struktur Makro	<p>Tematik Tema/topik yang dikedepankan dalam suatu berita</p>	Topik
Superstruktur	<p>Skematik Bagaimana bagian dan urutan</p>	Skema

	berita diskemakan dalam teks berita utuh	
Struktur mikro	Semantik Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Misal dengan memberi detil pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detil sisi lain	Latar, Detil, maksud, Pra-anggapan, Nominalisasi
Struktur Mikro	Sintaksis Bagaimana kalimat (Bentuk, susunan) yang dipilih	Bentuk kalimat, Koherensi, Kata Ganti
Struktur Mikro	Stilistik Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita	Leksikon
Struktur Mikro	Retoris Bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan	Grafis, Metafora, Ekspresi

Sumber: (Eriyanto, 2001: 228).

F. 6. 2. Analisis Kognisi Sosial

Analisis kognisi sosial ini dilakukan untuk melihat kognisi sosial wartawan terkait dengan produksi berita yang di hasilkan. Dalam hal ini yang diteliti adalah kesadaran mental wartawan. Kognisi ini dapat dilihat dari ideologi, ilmu pengetahuan, prilaku, norma, dan nilai dari sebuah institusi sebagai representasi dari kognisi sosial. Menurut Van Dijk analisis kognisi sosial menekankan bagaimana peristiwa dipahami, didefinisikan, dianalisis, ditafsirkan, dan ditampilkan dalam suatu model dalam memori (Eriyanto, 2001: 268).

Pada kajian penelitian konstruksi pemberitaan tentang Soeharto pasca wafat, kognisi sosial dari produksi dan reproduksi teks oleh Kompas dilakukan dengan menggunakan interteks dan interdiskursif. Melalui teks dan literatur yang dianggap relevan, peneliti berupaya menganalisis dan memahami produksi berita hingga proses terbentuknya teks dengan melihat wacana dominan dibalik pesan yang disampaikan.

F. 6. 3. Analisis Konteks Sosial

Pada wilayah analisis konteks sosial, penulis akan melakukan studi literatur, sejarah, dan penelusuran kepustakaan. Analisis konteks sosial berfungsi untuk menganalisis bagaimana masyarakat melakukan produksi dan reproduksi wacana. Analisis konteks sosial berusaha menganalisis dan mengaitkan wacana di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain. Van Dijk mengatakan bahwa titik penting dari analisis ini adalah menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskursus dan legitimasi (*Eriyanto, 2001: 271*).